
**KERAJAAN BONE DALAM LINTASAN
SEJARAH SULAWESI SELATAN
(SEBUAH PERGOLAKAN POLITIK DAN KEKUASAAN
DALAM MENCARI, MENEMUKAN, MENEGAKKAN DAN
MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI ENTITAS
BUDAYA BUGIS)**

Anzar Abdullah

Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar

Abstrak

Tujuan penulisan ini ialah, untuk mendeskripsikan bagaimana Bone sebagai sebuah kerajaan memegang peranan penting dalam konteks hubungan kekuatan politik dan kekuasaan di Sulawesi Selatan, setidaknya pada kurun waktu abad ke 13 sampai abad ke 16 Masehi. Bone sebagai sebuah kerajaan besar, mampu eksis hingga memasuki abad ke-XX. Meskipun pada paruh pertama abad ke-XX itu, Bone sebagai kekuatan politik dan kekuasaan praktis berakhir, karena telah dikuasai oleh Belanda pada tahun 1905. Kerajaan Bone selama kurang lebih empat abad lamanya, tampil memegang hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan pasca Perjanjian Bongaya 1669. Sejak itu pula, Bone merupakan saingan terberat Kolonial Belanda dalam menanamkan pengaruh politiknya di Sulawesi Selatan. Dalam melakukan analisis sejarah Bone, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode historis melalui empat tahapan, yaitu: heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bone sebagai salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan, telah mengalahkan Kerajaan Gowa dan menggantikan posisinya sebagai pemimpin dan pemegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan dan kawasan Timur Nusantara Pasca Perjanjian Bongaya 1669-1905 M.

Kata kunci: Bone dalam lintasan Sejarah Sulawesi Selatan.

Abstract

This paper is aimed to describe how Bone as kingdom plays an important role in the context of political strength and power in South Sulawesi, at least during the period of 13th century AD. Bone as a great kingdom, able to exist until well into the twentieth century. Although the first half of the century, Bone as a political strength and practical power ends, because it has been controlled by the Dutch in 1905. The kingdom of Bone for more than four centuries appeared holding a hegemonic of power in South Sulawesi after the Bongaya Agreement in 1669. Since also, Bone is the heaviest rival of Dutch colonial to give its political influence in South Sulawesi. In analyzing the history Bone, the study was done by using historical methods through four stages; heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of study showed that Bone as one of the greatest kingdom in South Sulawesi has defeated the kingdom of Gowa and substituting its position as leader and holder of political hegemony in South Sulawesi and the eastern part of the archipelago post Bongaya Agreement in 1669-1905.

Keywords: Bone in the history passage of South Sulawesi.

PENDAHULUAN

Kerajaan Bone, yang sekarang ini menjadi Kabupaten Administratif Bone, pada zamannya adalah gabungan dari unit-unit atau persekutuan politik yang disebut “*anang*” yang dipimpin oleh seorang “*matoa anang*”. Selanjutnya dari anang ini terbentuk sebuah “wanua” (negeri), seperti Wanua Ujung, Wanua Tibojong, Wanua T'a, Wanua Tanete Riattang, Wanua Tanete Riawa, Wanua Pongeng, dan Wanua Macege. Ketujuh wanua inilah yang kemudian disebut “*ade pitu'e*”. Setiap pembentukan kelompok wanua sangat dimotivasi oleh rasa ikatan seketurunan dari nenek moyang yang sama dan membentuk persekutuan teritorial yang tertutup terhadap persekutuan teritorial lainnya, dalam system kehidupan patrimonial (garis keturunan, genealogy dari pihak ayah). Implikasinya menciptakan konflik di antara sesama wanua.

Proses lahirnya Bone sebagai sebuah kerajaan, diawali dengan kisah kehadiran seorang “*Tomanurung*” sebagai seorang penguasa sentral di Kerajaan Bone. Sebagai sebuah entitas atau bangsa, maka sebelum “*tomanurung*” bersedia diangkat menjadi raja, maka harus ada kesepakatan melalui ikrar atau sumpah antara “*tomanurung*” dengan penguasa dari tujuh wilayah Wanua tadi.

Munculnya “*tomanurung*” sebagai pemimpin di kerajaan Bone, dikisahkan dalam sejarah lontarak, bahwa sebelum kedatangan tomanurung, terjadi hujan badai dan petir yang sambung menyambung selama tujuh hari tujuh malam. Setelah hujan reda, muncullah sosok seorang manusia di suatu tempat yang mengenakan jubah putih dan berdiri di tengah-tengah padang luas. Oleh karena penduduk tidak mengenal asal-usul orang tersebut, maka penduduk menyebut sebagai “*tomanurung*” (orang yang turun dari langit, dari kayangan). Maka setelah itu berkumpullah rakyat Bone, dan melakukan perundingan dengan kesepakatan ber-

angkat menemui tomanurung untuk mengangkatnya sebagai raja Bone (lihat, Edward. L. Poelinggomang., et.al. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1* (Cet.I, Makassar: Balitbangda, 2004/2005), h.32-33).

Setelah rakyat Bone sampai di hadapan “*tomanurung*”, mereka memohon agar tomanurung bersedia menjadi Raja Bone. Namun orang yang dimintai kesediaannya itu, menolak untuk menjadi raja, karena alasannya dia hanyalah orang biasa. Tetapi, tomanurung tersebut juga menawarkan sesuatu, bahwa jika rakyat Bone menginginkan seorang Raja sebagai pemimpin, maka ia bisa membawa mereka bertemu langsung dengan calon raja tersebut. Selanjutnya mereka rakyat Bone dibawa untuk bertemu langsung dengan calon Raja ke daerah yang dinamakan Matajang. Sesampainya di sana, terlihatlah seorang lelaki duduk berpakaian kuning di atas batu, yang oleh rakyat Bone disebut “*napara*” bersama tiga orang pengikutnya, yang masing-masing bertugas mengipasi, memayungi, dan membawakan tempat sirih.

Rombongan rakyat Bone pun langsung memohon kepada lelaki yang sedang duduk di atas batu “*napara*” itu agar bersedia menjadi Raja di Bone. Maka lelaki itupun berkata “*teddua nawanawao*” (artinya: orang setia), dan “*temma'belleo*” (artinya: tidak memungkir segala janji). Setelah ikrar atau janji itu diucapkan, maka lelaki itupun resmi diangkat menjadi Raja, sehingga ia pun “*malleke' dapureng'ni Manurung'e* (artinya: memindahkan Manurung'e ke Bone) dan kemudian menjadi Raja Bone I di sana. Sesampainya di Bone (tepatnya “*tanah bangkala'e*), yang sekarang ini menjadi lapangan Merdeka Watampone. Ditempat inilah didirikan Istana Raja untuk Manurung'e.

PROSES PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN BONE

Raja Bone atau Arung Pone, Manurung'e ri Matajang yang begelar Mata Silompo'e. Raja ini memerintah selama kurang lebih 40 tahun lamanya (1330-1370 M). Mata Silompo'e kawin dengan Manurung'e ri Toro, yang bernama Tenriawaru. Dari pernikahannya ini lahirlah lima orang anak, masing-masing bernama: La-Ummasa, Pattanra Wanua, Tenri Salogo, We Arattiga, dan Isamateppa (lihat Darwas Rasyid, *Latenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan* (Cet.I, Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1994), h.59).

Setelah Manurung'e ri Matajang menjadi Raja Bone I, barulah ketertiban dan keamanan dapat ditegakkan, dan kesejahteraan rakyat dapat dikembalikan. Ditetapkannya Manurung'e sebagai Raja Bone, kemudian disusul pula pembentukan Dewan Penasehat Raja, yang disebut "Ade' Pitu'e, yang artinya Dewan Hadat Tujuh. Disebut Dewan Hadat Tujuh, karena anggota-anggotanya terdiri dari tujuh komunitas Wanua. Dengan bantuan Ade' Pitu'e, Raja Bone I membuat peraturan dan perundang-undangan bagi kerajaan. Raja Bone I menegakkan hukum dan adat istiadat untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Selama pemerintahannya, rakyat Bone mencapai tingkat kesejahteraan hidup makmur. Pada suatu hari, Raja Bone I atau Arungpone Mata Silompo'e ini telah mangkat dengan cara gaib menghilang entah kemana. Rakyat Bone menyebutnya "mallajang (lihat, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/22/riwayat-raja-bone>)."

Setelah Arung Pone Mata Silompo'e Raja Bone I mangkat, beliau digantikan oleh puteranya yang bernama La-Ummase'. Dalam Lontara Akkarungeng ri Bone, La-Ummase (1358-1424), disebutkan bahwa dialah yang menggantikan Manurung'e ri Matajang sebagai Arung Mangkau di Bone. Beliau bergelar "Petta

Panre Bessi'e. Disebut Petta Panre Bessi'e (Pandai Besi) karena dialah Raja Bone yang mula-mula menciptakan alat dan perkakas dari besi. Ketika La-Ummase bepergian, ia selalu dinaungi tameng yang terbuat dari besi untuk melindungi dirinya, baik dari panas maupun hujan.

Sebagai Raja Bone II, ia melakukan ekspansi atau perluasan wilayah taklukan di sekitarnya. Anro Biring, Matajang, Biru, Macege, dan Cellu (dikisahkan dalam Lontara Akkureng ri Bone). Politik ekspansinya berhasil menaklukkan kerajaan kecil tetangganya tadi, seperti: Macege, Biru, Matajang, Anro Biring, Cellu, Palakka, dan Tanete Riattang (lihat, Darwas Rasyid, *Latenritatta Arung Palakka*, h.61).

La-Ummase tidak memiliki putera mahkota yang kelak bisa menggantikan kedudukannya sebagai Raja Bone atau Mangkau' di Bone. Dia hanya memiliki anak perempuan, masing-masing bernama: To Sulle dan To Sulewakkang dari isterinya yang berasal dari orang biasa, bukan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa We Pattanra Wanua akan melahirkan (saudara perempuan La-Ummase), maka La-Ummase menyuruh anaknya ke Palakka ke rumah saudaranya yang diperisterikan oleh Arung Palakka La Pattikkeng. We Pattanra Wanua pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Lasaliyu Karampeluwa.

Setelah Lasaliyu Karampeluwa dewasa, maka beliau mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Bone dari tangan kedua sepupu perempuannya. Dalam Lontarak Akkarungeng ri Bone, disebutkan bahwa Lasaliyu Karampeluwa (1424-1496 M) adalah Arungpone (Raja Bone) III yang menggantikan pamannya, La-Ummase. Dia diberi gelar "Makkaleppi'e-Massulappe Lawelareng atau Petta Lawelareng." Sebagai raja Bone ke III, Lasaliyu Karampeluwa melanjutkan politik ekspansi pendahulunya, bahkan lebih gen-

car dan berhasil menduduki serta menaklukkan kerajaan kecil disekitarnya, seperti: Pallengoreng, Sinring, Melle, Sancereng, Corawali, Apala, Bakke, Attang Salo, Soga, Lampoko, Lemoape, Parippung, Lempu, Limampanua Rilau Ale', Barebbo, Pattiro, Cinennung, Ureng, Passampe, Kaju, Ponre, dan Aserabate' Riwang Ale'.

Dari data-data sejarah yang diperoleh dari Lontara Akkarungeng ri Bone, menunjukkan bahwa raja Lasaliyu Karampeluwa, Raja Bone III telah menguasai wilayah yang luas menurut ukuran kekuasaan pada waktu itu. Konsekwensinya, ialah organisasi pemerintahan harus ditingkatkan. Untuk itu Lasaliyu membagi wilayah pemerintahan Kerajaan Bone menjadi tiga wilayah administrative, sesuai dengan pembagian warna bendera Kerajaan Bone. *Pertama*, negeri-negeri yang memakai bendera "*Worongporong*", wilayahnya adalah: Matajang, Maroanging, Bukaka Tengah, Kawerrang, Pallengoreng, Macege. Wilayah ini semuanya dibawah koordinasi Matoa Matajang. *Kedua*, negeri-negeri yang memakai bendera umbul merah di sebelah kanan *Worongporongng'e*. Wilayahnya ialah: Pacing, Tanete, Lemo Ape, Masalle, dan Belawa. Semua wilayah ini dibawah koordinasi Kajao Ciung. *Ketiga*, negeri-negeri yang memakai umbul merah di sebelah kiri *Worongporong'e*, yaitu: Arasoe, Ujung, Ponceng, Ta', Katumpi, Padaccengnga, dan Madello. Wilayah ini dibawah koordinasi Kajao Araso'e (lihat, Darwas Rasid, *Latenritatta Arung Palakka*, h.61).

Sejalan perkembangan kerajaan Bone, kebijakan mengenai pertanahan dan hukum warisan diumumkan secara resmi untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban rakyat kerajaan. Setelah genap berusia 70 tahun Arungpone III, ia kemudian mengumumkan kepada rakyat Kerajaan Bone, bahwa raja berikutnya adalah We Banrigau Daeng Marowa Makkaleppi'e; yakni anak perempuan dari

Lasaliyu Karampeluwa Raja Bone III dari isteri keduanya yang bernama We Tenri Roppo Arung Pacing. Inilah untuk pertama kalinya Kerajaan Bone dipimpin oleh seorang perempuan. We Benrigau Daeng Marowa Makkaleppi'e, naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Bissu Lalempili. Di masa pemerintahan Raja Bone IV, We Banrigau Daeng Marowa Makkaleppi'e yang bergelar Bissu Lalempili, kerajaan Bone mencapai stabilitas dalam negeri yang mantap, kesejahteraan rakyat terjamin, hasil-hasil pertanian melimpah. Raja perempuan pertama dari kerajaan Bone ini memerintah dari tahun 1470-1489 M. Raja Bone IV ini, tidak melanjutkan pendahulunya dalam melancarkan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan, tetapi beliau aktif dalam usaha memperluas dan mengintensifkan lahan pertanian rakyat kerajaan. Misalnya, beliau membeli gunung (bulu') Cina untuk dijadikan lahan pertanian, dengan menukarnya 90 ekor kerbau; dan sawah di sekitar kampung Lalliddong dengan menukarnya 30 ekor kerbau (lihat, Darwas Rasid, *Latenritatta Arung Palakka*, h.61).

Meskipun usahanya begitu keras dalam menciptakan kesejahteraan rakyat kerajaan, di masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh La Dati Arung Katumpi, karena persoalan pembelian areal persawahan; tetapi pemberontakan itu dapat dipadamkan. Setelah memerintah selama kurang lebih 20 tahun lamanya, beliau kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada puteranya yang bernama Latenrisukki. Setelah pelantikan sebagai Raja Bone V, Latenri Sukki bersama keluarganya meninggalkan pusat kerajaan, dan pergi menetap di Cina hingga beliau menghilang dan diberilah gelar Mallajang ri Cina. Mengenai kasus ini, informasi kesejarahan belum menemukan titik terang tentang kebenaran informasi tersebut. Karena ada pertanyaan" Cina yang mana yang dimaksudkan, apakah Cina yang ada di daratan Tiong-

kok sana atau Cina yang ada di daerah Bone sendiri, suatu tempat atau daerah kecil yang terdapat di pedalaman.” Oleh karena itu masih memerlukan penelitian sejarah lebih lanjut.

Pada masa pemerintahan Raja Bone V, Latenri Sukki sebagai pewaris tahta dari ibunya, We Benrigau, Latenrisukki merupakan Raja Bone pertama yang disebutkan dalam lontara memiliki hubungan kerjasama dengan kerajaan besar lainnya di Sulawesi Selatan. Raja Bone ini memerintah pada akhir abad ke XV sampai permulaan abad ke XVI M. Di masa pemerintahannya, berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Luwu, Dewaraja Batara Lattu. Setelah perang selesai (Perang itu dikenal dengan “Perang Cellu”), karena pasukan dari kerajaan Luwu berlabuh di Cellu sebelum menyerang pusat kerajaan Bone. Perang Cellu dimenangkan oleh pasukan Bone.

Pasca Perang Cellu, Raja Bone V, Latenrisukki mengadakan perjanjian dengan Datu Luwu To Serangeng Dewaraja yang terkenal dengan Perjanjian “*Polo Malella’e ri Unnyi*” (Perjanjian Gencatan Senjata) di daerah Unnyi, karena terjadi di kampung Unnyi. Usai perjanjian Polo Malella’e ri Unnyi ini, kedua raja dari Bone dan Luwu kembali ke negerinya masing-masing. Isi perjanjian di Unnyi tersebut, tidak memuat unsur-unsur yang menetapkan pembayaran kerugian perang dari pihak Luwu (yang kalah perang) ke pada pihak Bone (sebagai pemenang perang). Dengan demikian perjanjian perdamaian tersebut menyimpang dari kelaziman perjanjian gencatan senjata yang pada umumnya menetapkan sanksi kerugian perang yang harus dibayar oleh Negara agresor terhadap Negara yang kalah perang. Ini menunjukkan pendekatan diplomasi secara kekeluargaan dari Latenrisukki raja Bone V ini sangat jitu dan berhasil.

Berdasarkan hasil telaah dari naskah perjanjian Unnyi, dapat disimpulkan

bahwa pada hakikatnya, Perjanjian Unnyi adalah perjanjian persekutuan antara Bone dan Luwu. Persekutuan semacam ini, baru untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Kerajaan Bone. Arti strategis “*Polo Malella’e ri Unnyi*” bagi Bone ialah sukses di bidang politik dan militer. Melalui peristiwa tersebut, menempatkan Bone dalam posisi strategis dan prestisius yang kuat terhadap kerajaan kecil di sekitar wilayah Kerajaan Bone, bahkan juga kerajaan lainnya di kawasan Sulawesi Selatan.

Pada masa pemerintahannya, Raja Bone V Latenri Sukki, lagi-lagi menghadapi pemberontakan dari orang-orang Mampu, salah satu kerajaan kecil di sekitar Bone. Namun sekali lagi, pemberontakan itu dengan mudahnya dapat dipadamkan. Setelah memerintah selama kurang lebih 27 tahun lamanya, beliau pun wafat. Sebagai penggantinya, ditunjuklah puteranya yang bernama La Uliyo Bote’E, hasil perkawinannya dengan sepupunya We Tenri Songke, sebagai Raja Bone VI. Digerai Bote’E, karena putera Raja ini postur tubuhnya subur (gempal).

Pada masa pemerintahan La-Uliyo Bote’E, Kerajaan Luwu kembali menyerang Bone, namun dikalahkan kembali oleh tentara Bone. Bone setelah itu memperoleh bantuan dari Gowa untuk memerangi sekutu utama Luwu dan Wajo. Tetapi perlu diketahui, bahwa Gowa membantu Bone karena niat tersembunyi, yakni ingin merebut kekuasaan di sebelah Timur Semenanjung Sulawesi Selatan. Memang belakangan terbukti bahwa Gowa mengundurkan diri, dan berkonsentrasi untuk mencapai tujuannya di Semenanjung Barat Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan La-Uliyo Bote’E ini pula Bone mulai diincar oleh Gowa.

La-Uliyo Bote’E sebagai Raja Bone VI, pada masanya inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Bone, seorang Raja di dampingi oleh Juru Bicara Kerajaan, yakni Kajao Lalliddong (Kajao Laliddong

adalah sebuah gelar bagi seorang pemikir politik dan negarawan dari Tanah Bugis Bone. Kajao Laliddong pula yang mencoba menanamkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, yaitu: Lempu' (kejujuran), Acca (kepandaian, kecerdasan, Assitinajang (kepatutan), Getteng (keteguhan pada prinsip), Reso (usaha, kerja keras), Siri' (harga diri, martabat)). Pada masa pemerintahannya diadakan perjanjian dengan Gowa dibawah kepemimpinan raja Gowa Karaeng To Mapparisi Kallonna. Peristiwa perjanjian diplomatic pertama antara Bone dengan Gowa, diupacarakan dengan pergelaran senjata sakti dari kedua kerajaan "*sitettongenma Sudeng'nge-Lateya Riduni*" di Tamalate. Kunjungan Raja Gowa secara formal, dan berhasil membentuk hubungan persahabatan bilateral antara Gowa dengan Bone. Dengan upacara khidmat, memperhadapkan senjata kebesaran Kerajaan Bone dan senjata kebesaran Kerajaan Gowa di Laccokkong, Watampone, ibu kota Kerajaan Bone (1538 M).

Setahun kemudian, Raja Bone VI La-Uliyo Bote'E melakukan kunjungan balasan ke Kerajaan Gowa dan berhasil membentuk *dualalliance* antara Bone dengan Gowa yang disebut "*Ulu Ada'e ri Tamalate*" (Perjanjian Tamalate). Perjanjian ini berisikan bahwa Bone dan Gowa bersepakat untuk saling memberikan bantuan militer, bilamana ada diantara mereka dalam keadaan bahaya, berupa ancaman militer dari negeri lain. Peristiwa ini, merupakan kesuksesan di bidang politik dari Raja Bone V La-Uliyo Bote'E. Setelah memerintah selama 25 tahun lamanya, La-Uliyo Bote'E menunjuk puteranya La Tenri Rawe Bongkangng'E sebagai Raja Bone VII menggantikan dirinya.

PERJANJIAN TELLUMPOCCOE

Perjanjian Tellumpocoe, adalah perjanjian yang melibatkan tiga kerajaan Bugis, yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Perjan-

jian ini di dasarkan pada keinginan untuk mengikat tali persaudaraan ketiga kerajaan Bugis tersebut. Selain itu motivinya ialah untuk bersatu menentang agresinya Kerajaan Gowa yang merupakan penguasa adi daya di daratan Sulawesi pada zamannya.

Sebelum perjanjian dilakukan oleh ketiga *triple alliance*, Bone, Soppeng, dan Wajo ini, memang pada pemerintahan Raja Bone VII, Latenri Rawe Bongkang'nge telah terjadi beberapa kali serangan militer dari Kerajaan Gowa yang disebabkan masuknya Bone ke dalam penggabungan "*Tellulimpo'e*", yang terdiri dari Luwu, Gowa, dan Bone (lihat, Mattulada, *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaanannya* (Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1974), h.5).

Ketika terjadi peperangan antara Gowa dan Bone; Wajo yang ketika itu bersekutu dengan Gowa ikut serta dalam pertempuran melawan Bone. Setelah tiga hari lamanya pertempuran berlangsung, pasukan Bone terdesak. Namun berkat semangat dari pasukan Bone, peperangan berlangsung dengan sengitnya, dan pasukan Gowa yang dibantu pasukan dari Wajo berhasil dipukul mundur oleh tentara Bone. Tidak berhenti di situ. Gowa tampaknya tidak mau menerima kekalahan itu, di bawah kepemimpinan Raja Gowa Tonibate, ia balik menyerang Bone. Namun Raja Gowa jatuh sakit, dan tewas setelah kepalanya dipancung oleh tentara Bone. Lalu setelah itu, Juru Bicara Kerajaan Bone, Kajao Lalliddong mewakili Bone, dan Karaeng Tallo yang mewakili Gowa mengadakan pertemuan yang menghasilkan perjanjian "*Cappa'e ri Caleppa*." Yang isinya tentang penentuan batas wilayah kedua kerajaan, sebagai pembatasnya ialah Sungai Tangka di Selatan (Nur, 2009: 64).

Raja Gowa Karaeng Bonto Langkasa memberi perintah kepada Arung Matowa Wajo sebagai abdi Gowa untuk mengangkut kayu dari pegunungan Barru

ke pinggir laut untuk dipergunakan mendirikan istana di Tamalate sebagai Ibu kota Kerajaan Gowa. Namun Arung Matowa Wajo merasa tidak senang diperlakukan sewenang-wenang oleh Gowa, maka perintah itu disampaikan kepada Raja Bone. Setelah mendengar hal tersebut, Raja Bone merasa tidak senang juga, dan mengajak Arung Matowa Wajo dan Datu Soppeng untuk bersama-sama ke Barru. Sesampainya di Barru, di sana Raja Gowa heran melihat ketiga pembesar kerajaan Bugis tersebut datang; karena yang dia panggil hanyalah Raja Wajo. Tetapi Raja Bone menjawab, bahwa “orang Wajo takut melewati daerah yang tidak dihuni manusia” (Nur, 2009: 64). Kemudian Raja Bone, Soppeng, dan Wajo secara bersama-sama memotong tali pengikat kayu-kayu itu secara bergantian dengan menyanyikan lagu-lagu, yang intinya sesama kerajaan yang terintimidasi atau dijajah ingin bersatu mengadakan perlawanan dengan menyatukan kekuatan.

Setelah kejadian itu, ketiga kerajaan Bugis, Bone, Soppeng, dan Wajo (BOSOWA) bermusyawarah untuk menyerang Cenrana tujuh hari ke depan. Pada hari yang ditentukan telah tiba, mereka pun menyerang dan membumi hanguskan Cenrana, yang merupakan wilayah kekuasaan Gowa yang dirampas pada masa penyerangannya ke Bone. Lalu mereka, Bone, Soppeng, dan Wajo sepakat untuk kembali ke daerah Timurung untuk mempererat persaudaraan mereka dalam menghadapi serangan dari Kerajaan Gowa.

Di Timurung, mereka bertemu kembali dan mengadakan perjanjian persaudaraan yang kemudian disebut dengan “Tellumpocco’e” (tiga puncak) dengan bersama-sama menanamkan batu sebagai symbol persaudaraan di Timurung pada tahun 1582 M. Batu yang ditancapkan itu kemudian oleh orang Bugis disebut “*Lamumpatu’e ri Timurung*”.

Raja Gowa yang mengetahui bahwa Bone, Soppeng, dan Wajo (BOSOWA) membangun kekuatan baru dalam perjanjian Tellumpocco’e, marah dan kemudian berencana menyerang sekutunya sendiri, yakni Wajo yang dicapnya sebagai penghianat. Dua tahun setelah Perjanjian Tellumpoccoe, Latenri Rawe Bongkang’nge (Raja Bone VII) wafat karena sakit. Sebagai penggantinya ialah saudaranya yang bernama La Inca, yang ditunjuk sebagai Raja Bone VIII. Pada tahun 1585 M, terjadilah perang antara Bone dan Gowa dalam memperebutkan wilayah pengaruh kekuasaan. Kepemimpinan La Inca, tidak sebaik dan setangkas saudaranya Raja Bone VII. Pemberontakan terjadi di mana-mana, hingga akhirnya ia mati di atas tangga istana setelah berkuasa selama 11 tahun lamanya.

Sesuai anjuran dari Arung Matawang, maka ditunjuklah La Pattawettu menggantikan La Inca sebagai Raja Bone IX. Pada masa pemerintahan La Pattawettu, tidak banyak diungkap oleh lontara Akkarungeng Bone. Juga tidak ada berita atau informasi sejarah tentang adanya serangan militer dari Gowa ke Bone. Hanya ada informasi, bahwa setelah tujuh tahun menjadi Mangka’u di Bone (Raja Bone), ia pergi ke Bulukumba dan disitulah ia sakit pada tahun 1602. Setelah wafat, tahta kerajaan Bone diserahkan kepada puterinya yang bernama We Tenri Tuppu yang berkuasa dari tahun 1602-1611 M.

Pada tahun 1607, Raja Gowa mengirimkan tentara untuk menyerang kerajaan Bugis. Namun persekutuan Tellumpoccoe amat kuat pertahannannya untuk ditembus. Selama tiga tahun peperangan berlangsung, kemenangan selalu diraih oleh gabungan BOSOWA. Bahkan tentara dari BOSOWA ini melancarkan serangan militernya terhadap kekuatan Gowa di Akkotengeng, dan berhasil memukul mundur tentara Gowa.

Enam bulan setelah peristiwa di Akkotengeng, kerajaan Gowa memperkuat kembali pasukannya dan membangun benteng di daerah Rappang (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten SIDRAP). Namun berselang tiga hari Raja Gowa meninggalkan benteng itu lalu kembali ke Makassar. Melihat hal ini, pasukan BOSOWA melakukan pengepungan dan menyerang sisi pertahanan Gowa di Rappang. Namun sekali lagi pasukan BOSOWA terdesak mundur.

Mundurnya pasukan BOSOWA, memberikan inspirasi kekuatan, bahwa ini menunjukkan pasukan BOSOWA tidak terkoordinir dengan baik, sehingga Raja Gowa terus meningkatkan serangannya terhadap BOSOWA dan sekutunya. Lima bulan setelah itu, Gowa melanjutkan ekspansinya dengan menyerang Soppeng, lalu dilanjutkan dengan serangan terhadap Wajo. Setelah Wajo ditaklukkan, kemudian terakhir adalah Bone, yang jatuh pada tahun 1611 M.

ISLAMISASI DI KERAJAAN BONE

Proses Islamisasi di kerajaan Bone, tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang sedang berlangsung di kerajaan Gowa. Setelah Islam menjadi agama kerajaan di Gowa, maka penyebaran Islam pun di mulai ke seluruh wilayah di luar kerajaan Gowa. Setelah Raja Gowa memeluk Islam, yakni Sultan Alauddin Awwalul Islam, maka islamisasi pun semakin gencar dilakukan. Atas perintahnya, siar Islam dilakukan dengan pertama-pertama mengajak kerajaan tetangganya, seperti Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Alasannya ialah berdasarkan perjanjian yang berbunyi "...bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja sekutunya (Nur, 2009: 64)."

Meskipun demikian kehendak Raja Gowa, jalan damai tampaknya tidak berlaku bagi Bone. Bone bersama sekutunya tidak mempercayai penyebaran Islam

yang dilakukan oleh kerajaan Gowa. Menurut Bone, Gowa tidak tulus menyebarkan Islam, melainkan bermotiv politis. Asumsi itu, tentu sangat beralasan, karena dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut mereka, ini adalah siasat Gowa untuk menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan (Borahima, 1971., Lihat juga hamid, 1965).

Karena Bone menolak masuk Islam, akhirnya Gowa menyerang Bone dengan kekuatan penuh. Terjadilah pertempuran yang sengit yang dalam sejarah Bone dikenal dengan "*musu seleng'nge*" atau perang pengislaman. Proses islamisasi yang dilancarkan oleh Gowa terhadap semua kerajaan di Sulawesi Selatan ialah dengan jalan politik ekspansi atau melalui tekanan politik, khususnya kerajaan Bone. Berturut-turut dikuasai, Soppeng tahun 1609 M, Wajo 1610 M, dan Bone yang terakhir diduduki oleh Gowa tahun 1611M. Ketika itu, yang memerintah di Bone ialah Raja Bone XI, Latenri Ruwa. Latenri Ruwa hanya berkuasa selama 3 bulan, disebabkan dirinya masuk Islam, sementara Dewan Hadat Tujuh (Ade'Pitu'e) di Bone menolak bersama rakyat. Akhirnya beliau meninggalkan Bone menuju Makassar untuk memperdalam agama Islam, dan akhirnya meninggal di Bantaeng. Latenri Ruwa Raja Bone XI ini, setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Adam bergelar *Matinroe ri Bantaeng*. Beliau adalah Raja Bone yang pertama kalinya memeluk agama Islam dalam sejarah Kerajaan Bone.

Setelah Sultan Adam wafat, diangkatlah penggantinya Latenri Pali Arung Timurung pada tahun 1611 M sebagai Raja Bone XII. Nama lengkapnya ialah *Latenri Pali To Akkeppiang Arung Timurung* (1611-1625 M). Beliau adalah anak dari La-Inca *Matinroe ri Addenenna*, Raja

Bone VIII. Latenri Pali sebagai Raja Bone XII sangat menentang islamisasi yang dilakukan oleh Gowa, karena menurutnya ini adalah politik pintu masuk bagi Gowa untuk menjajah Bone.

Namun karena kekuatan tentara dan persenjataan yang tidak seimbang secara terus menerus dilancarkan Gowa, akhirnya Bone dapat ditaklukkan pada tahun 1611 M. Ini berarti Bone telah masuk Islam secara politik, tetapi belum tentu secara kultural. Meskipun ketika itu, semua pembesar kerajaan dan seluruh Arung Palili (Raja negeri bawahan Bone) diundang ke Istana untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Selama masa pemerintahan Latenri Pali to Akkepiang (1611-1631 M), rakyat Bone mengalami penderitaan disebabkan tekanan dari Gowa.

Lain halnya juga, ketika Lamaddaremmeng (1625-1640) yang menggantikan pamannya Latenri Pali to Akkepiang sebagai Raja Bone XIII. Beliau sangat mengamalkan agama Islam, bahkan lebih keras dari penerapan Islam di Kerajaan Gowa dan Tallo. Gagasannya yang sangat terkenal ialah menghapuskan system perbudakan di Bone (ata'), karena alasannya manusia dilahirkan bukan untuk diperbudak. Beliau juga menegakkan hukum Islam dan menghukum pelaku zina, pencurian, minuman keras, penyembah berhala, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Inilah sejarah awal penerapan syariat Islam secara legal formal di Sulawesi Selatan dimulai dari Kerajaan Bone (lihat, Amansyah, Pengaruh Islam dalam Adat Istiadat Bugis-Makassar, *Bingkisan* II-5 (Ujung Pandang:YKSST, 1969). Lihat juga, *Undang-Undang Bone*, translated to Indonesian by Daeng Latuppu, in *colectie Korn, Celebes 12, KITLV, Leiden, 1914*). Tepatnya, pada masa pemerintahan Lamaddaremmeng, Raja Bone XIII. Tindakan dan sikap tegas dari Lamaddaremmeng, mendapat tantangan berat dari para pembesar kerajaan, termasuk ibu kand-

ungnya sendiri, Datu Pattiro We Tenrisoloreng yang menolak ajaran Islam yang digagas oleh anaknya, karena dianggapnya sangat keras dan tidak toleran, ibunya lebih tertarik dengan ajaran Islam versi kerajaan Gowa dan Tallo, karena lebih sufistik dan sesuai dengan nilai-nilai pra Islam di Bone (lihat, Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.12).

Tersebutlah dalam sejarah Bone, bahwa Raja Lamaddaremmeng sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan menerapkannya dalam praktik kehidupan masyarakat di kerajaan Bone pada masa pemerintahannya. Bahkan Lamaddaremmeng berusaha agar kerajaan yang tergabung dalam BOSOWA (Bone, Soppeng, Wajo) ditambah Ajatap-pareng menirunya, terutama dalam membebaskan hamba sahaya atau system perbudakan. Praktik menegakkan syariat Islam telah dilakukannya selama pemerintahannya. Baginda bertindak tegas kepada siapa saja yang melanggar kebijakan kerajaan.

Kerajaan Gowa yang tidak senang kepada Bone, dengan alasan menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan, kembali melakukan serangan terhadap Bone di masa pemerintahan Karaeng Sultan Malikus Said pada tahun 1644 M. Ini menunjukkan bahwa Gowa tidak setuju terhadap penghapusan perbudakan. Lamaddaremmeng sendiri dalam menghadapi serangan Gowa tersebut dibantu oleh saudaranya Latenriaji Tosonrime. Berhubung serangan Gowa yang mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, sehingga pertahanan Bone jebol, dan Raja Bone XIII Lamaddaremmeng menyingkir ke daerah Larompong (lihat, Zainal Abidin Farid, *Perkembangan kekuasaan Datu Luwu' sepanjang yang sampai pada kita melalui keterangan-keterangan orang-orang Luwu, dalam*

Bingkisan, III. No.1 & 2, III No. 3 & 4 (Ujung Pandang: YKSST, 1969)). Di sana kemudian, Lamaddaremmeng ditawan dan selanjutnya dibawa ke Gowa, dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Sanrangan pada tahun 1644 M. Setelah itu, diangkatlah adiknya Latenriaji Toserrima sebagai Raja Bone XIV untuk melanjutkan perlawanan Bone terhadap Gowa. Setelah ditawan beberapa tahun lamanya, Lamaddaremmeng dibebaskan dan kembali ke Bone, tepatnya di daerah Bukaka. Di tempat inilah beliau wafat, sehingga digelar Lamaddaremmeng Raja Bone XII Matinroe ri Bukaka.

ARUNG PALAKKA DAN KOMPENI BELANDA (VOC)

Arung Palakka, adalah Raja Bone XV yang paling terkenal dalam sejarah Sulawesi Selatan, bahkan Sejarah Nasional dan Dunia. Nama lengkapnya, *Latenritatta Arung Palakka Petta Torisompa'e Malempe'e Gemmena Matinroe ri Bontoala* (1667-1696 M) (lihat, Abdul Razak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa* (Makassar: YKSST, 1969)). Beliaulah yang bersekutu dengan Kompeni Belanda bersama Buton dalam menaklukkan Gowa pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas dasar bersekutu dengan Belanda dalam usaha membebaskan kerajaan Bugis dari penjajahan Gowa, maka dirinya dicap sebagai penghianat. Padahal untuk konteks zamannya waktu itu, Indonesia atau Republik Indonesia belum lahir. Yang ada waktu itu adalah Negara-negara kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri-sendiri.

Dalam Lontara Akkarungeng Bone, disebutkan bahwa Latenritatta Arung Palakka baru berusia 11 tahun, ketika Kerajaan Bone diperintah oleh Latenri Ruwa, dan masa itu pula Bone dapat dikalahkan oleh Gowa pada tahun 1611 M. Penaklukan Gowa atas Bone ini berlangsung pada masa pemerintahan Raja Gowa Imangerangi Daeng Manrabia Sul-

tan Alauddin. Orang tua Arung Palakka yang bernama Lapottobune ditangkap dan ditawan bersama Raja Bone dan pembesar kerajaan lainnya, dan kemudian dibawa ke Gowa, dan di sana mereka semuanya dijadikan tenaga kerja paksa (rodi) dalam membangun benteng Somba Opu. Penaklukan Bone oleh Gowa dalam sejarah dikenal dengan "Musu Passempe" (perang di Passempe), karena ditempat inilah mereka dikalahkan (Edward L.Poelinggomang, 2004/2005: 92).

Kisah sejarahpun berlanjut, Latenritatta Arung Palakka dan semua bangsawan Bugis Bone dan Soppeng, merasakan penderitaan dan malu (siri') yang luar biasa tercabik-cabik diperlakukan di luar prikemanusiaan. Tidak terkecuali Arung Palakka, ia juga ikut bergabung sebagai penggali parit dan pembuat benteng (Darwas Rasyid, 1993: 2-3). Arung Palakka turut merasakan bagaimana penderitaan bangsanya, rakyat Bone disiksa oleh tentara dan bangsawan Gowa yang mengawasi pekerja paksa (rodi). Ayah Arung Palakka, Lapottobune mengamuk, karena membela dua pelarian pekerja paksa bangsanya yang disiksa dan dipukuli. Dalam lontarak dijelaskan, bahwa sejak peristiwa itu Latenritatta Arung Palakka, tidak bisa tidur lagi. Hatinya gusar memikirkan bagaimana cara mengembalikan harkat dan martabat kebesaran kerajaan Bone (lihat, La Side Daeng Tapala, Sekelumit roman dari penghidupan Arung Palakka Malempe'e Gemmena, dalam *Bingkisan* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, 1968), h. 1-12., *Lontara Petta Malempe'e Gemmena: Sulawesi riattang 1611-1696*, Vol.3 (Ujung Pandang: YKSST)).

Kisah perjalanan hidup Latenritatta Arung Palakka dan para bangsawan Bugis Bone dan Soppeng yang melarikan diri dari barak-barak kerja paksa di Gowa, dikejar oleh tentara Gowa, meminta dukungan kepada Buton, Sumpah Arung

Palakka ketika akan menyeberang dari Tanah Bugis ke Tanah Buton (1660 M), semuanya dapat disimak di dalam Lontarak Akkureng ri Bone (lihat, Andi Makkaraka, Tjeritera orang dahulu jang mula pertama ditulis pada daun-daunan digulung dan kelak kemudian dikenal sebagai awal mula tulisan Bugis (Lontara) dalam *Bingkisan, I-6, I-7* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara)).

Ketika Arung Palakka sudah berada di Kerajaan Buton, atas kebaikan hati sahabatnya Raja Buton, Arung Palakka kemudian menyeberang ke Pulau Jawa, tepatnya ke Batavia (1663 M) untuk mencari bantuan atau sekutu dalam usahanya menaklukkan Gowa. Sesampainya di Batavia, Arung Palakka menawarkan kerjasama dengan Belanda (VOC). Namun sebelumnya, Belanda meminta bantuan Arung Palakka untuk bersama-sama berangkat ke Pariaman untuk membantu Belanda dalam menghadapi Perang Padri. Di sinilah Belanda melihat keberanian, dan ketangkasan Arung Palakka berperang, sehingga peperangan itu dimenangkan oleh Belanda atas bantuan Arung Palakka beserta pengikutnya (lihat, Ridwan Borahima, *Sejarah Bone pada masa pemerintahan Arung Palakka* (Malang: Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, 1971)).

Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba waktunya, pada tahun 1667 M, terjadilah perang terbuka antara Arung Palakka Raja Bone dengan bantuan Belanda melawan Gowa dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perang inilah yang kemudian meruntuhkan dan menggakhiri kebesaran Gowa sebagai kerajaan yang tersohor di kawasan Timur Nusantara. Perang Makassar (1667 M) memaksa Gowa menyerah dan menanda tangani isi Perjanjian Bongaya (1669 M) (lihat, Sultan Kasim, *Latar belakang perdjandjian persahabatan antara Arung Palakka dan Kompeni Belanda/VOC pada tahun 1669* (Makassar: IKIP, 1970). Lihat juga, Abdul

Rauf Rahim, *Hubungan Perjanjian Bongaya dengan proses kemunduran kerajaan Gowa* (Ujung Pandang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, 1974)). Leonard Andaya dalam bukunya "*The Heritage of Arung Palakka*" (*Warisan Arung Palakka*)-*Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-XVII*, mengurai dengan panjang lebar tentang peran dan sepak terjang Arung Palakka sebagai pemegang utama hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan dan kawasan Timur Nusantara pasca Perjanjian Bongaya. Sementara itu, Gowa semakin redup gaunnya dalam percaturan politik dan perdagangan di Nusantara sepanjang abad ke 17.

Sepeninggalnya, Latenritatta Arung Palakka Petta Torisompa'e Malemp'e Gemmena telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan hegemoni politik dengan cara "model tiga ujung". *Pertama*, ialah "*Cappa Lila*" yaitu kelihaihan berdiplomasi dan berunding. *Kedua*, "*Cappa Tappi*," yaitu perjuangan bersenjata. Cara kedua ini dipakai apabila dengan cara diplomasi dan berunding gagal ditempuh. *Ketiga*, "*Cappa Laso atau Cappa katawang*," yaitu dengan cara perkawinan atau kawin politik. Cara model ketiga ini adalah cara yang ditempuh apabila cara kesatu dan kedua gagal ditempuh. Cara ini pulalah yang dipakai oleh keturunan Bugis, sehingga orang Bugis eksis di mana saja di seluruh dunia (lihat Leonard Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) In The Seventeenth Century* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981)).

RUNTUHNYA BONE SEBAGAI KERAJAAN

Sejak runtuhnya kerajaan Gowa pasca Perjanjian Bongaya, Bone bangkit menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan Sulawesi Selatan dan Timur Nusantara, hingga memasuki awal abad ke XX M. Dalam konteks sejarah Sulawesi Selatan, dijelaskan

bahwa pada abad ke XIX M, kerajaan Bone adalah merupakan saingan utama Belanda dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaannya dalam bidang ekonomi dan politik. Akibatnya, kedua belah pihak ini pernah terlibat dalam perang besar. Dikatakan di dalam sejarah, bahwa perang terjadi pada tahun 1824-1825 M. Ketika Arung Palakka wafat, dan digantikan oleh saudaranya Arung Datu bergelar I-Maneng Paduka *Sri Ratu Sultana Salima Rajiatuddin*, pemerintahan Kesultanan Bone mencoba untuk merevisi Perjanjian Bongaya, beserta seluruh anggota persekutuan supaya diberlakukan hukum yang sama. Antara tanggal 8 Maret sampai 21 September 1824, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen mengadakan kunjungan ke Sulawesi dan Maluku. Semua raja-raja datang memberikan penghormatan, termasuk perwakilan Sultan Bone, kecuali Raja Suppa dan Tanete.

Gubernur Van der Capellen mengharapkan bahwa perundingan dengan kerajaan-kerajaan tersebut tidak akan membawa keuntungan apapun. Sekembalinya ke Batavia, sebuah armada dipersiapkan dengan prajurit sekitar 500 orang diberangkatkan dengan membawa 4 meriam, 2 howitzer, beserta 600 tentara cadangan dari kalangan pribumi untuk menyerang Bone (Edward L. Poelinggomang, 2004/2005: 24).

Dalam perang ini, Sri Ratu Sultana Salima Rajiatuddin terdesak, dan melarikan diri ke pedalaman. Meskipun rakyat Bone dan rakyat kerajaan bawahan Bone mengadakan perlawanan dengan sengitnya, namun persenjataan tidak seimbang. Tanete di Barru dapat dikuasai, sementara Suppa di Pinrang belum berakhir. Letnan Reeder dari pasukan Belanda melancarkan serangan bersama 240 prajurit yang dipersenjatai menyerang tentara Bugis di Suppa. Namun, karena tentara Bugis memasang strategi dengan cara membiarkan pasukan Belanda mendekat di sebuah bukit, barulah mereka melancarkan seran-

gannya. Akibat taktik ini, pasukan Belanda menderita kekalahan dan kehilangan sepertiga pasukannya. Dibawah pimpinan Kapten De Stuers, pasukan Belanda mengundurkan diri untuk kemudian melancarkan kembali ekspedisi lain.

Perang dalam usaha menaklukkan Kesultanan Bone sebagai pemimpin kerajaan-kerajaan di Sulawesi terus dilakukan oleh Belanda. Lalu perang secara berturut-turut pada tahun 1859 M sampai tahun 1950. Peperangan yang dilancarkan Belanda pada tahun 1905 terhadap pusat kekuasaan Kesultanan Bone, mengakibatkan benteng pertahanan Bone jebol, dan Belanda berhasil menaklukkan Bone. Inilah akhir perjalanan sejarah Kerajaan Bone ketika dipimpin oleh Raja Bone terakhir Lapawawoi Karaeng Sigeri. Lapawawoi Karaeng Sigeri sendiri tidak berhasil ditangkap, karena dapat meloloskan diri dan lari ke pedalaman untuk mengumpulkan pasukan yang tersisa, dan berencana membangun kekuatan kembali.

Sementara pengejaran terhadap Lapawawoi karaeng Sigeri oleh Belanda, Tomarilaleng bersama anggota Ade' Pitu'e menyatakan tunduk kepada Belanda. Serangan Belanda pada tahun 1905 telah menyebabkan Bone menderita banyak kerugian, termasuk tewasnya Panglima Besar Kerajaan Bone *Petta Ponggawae Baso Pagilingi Abdul Hamid*. Begitupun, pada akhirnya juga Lapawawoi Karaeng Sigeri dapat ditangkap, kemudian diasingkan ke Bandung dan meninggal pada Januari 1911.

KESIMPULAN

Dalam mengungkap kisah sejarah kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Bone, yang paling menarik dari semua episode itu, ialah ketika tampilnya sosok Latenritatta *Arung Palakka Petta Torisompa'e Malempe'e Gemmena* memainkan perannya sebagai tokoh sentral dalam Sejarah Bone dan Sejarah Sulawesi

Selatan; terutama ketika kita berusaha menyingkap keterlibatan Arung Palakka dalam Perang Makassar 1660-1669 M. Maka kita akan mencoba memahami apa sesungguhnya yang terjadi ketika itu? Dari sini kemudian melahirkan kegiatan berpikir apa? Kegiatan berpikir inilah yang paling penting diketahui sebagai upaya akademis untuk menempatkan suatu kejadian pada tempat yang sesungguhnya (sesuai konteks zamannya atau jiwa zamannya).

Pemahaman tersebut sangat penting artinya dalam memahami dasar filsafat dan etika Bugis yang menguasai jalannya sejarah ketika itu; itulah yang disebut dengan jiwa zaman. Bagi orang Bugis hidup ini adalah harga diri yang selalu harus dipelihara dan dipertaruhkan agar keseimbangannya dengan yang lain tetap terjaga. Apabila seseorang dibuat siri' /masiri' yang menyebabkan harga dirinya terganggu atau hilang, maka masyarakatnya menuntut untuk mengambil langkah dengan cara menyingkirkan penyebab siri' yang merusak keseimbangannya sebagai manusia, karenanya wajib menyingkirkan penyebab siri' di matanya sendiri maupun di mata masyarakatnya.

Dalam upaya mengembalikan siri' atau menegakkan siri' kadang nyawa menjadi taruhannya. Ketika nyawa ini dipertaruhkan, disitulah awal manusia Bugis memasuki sejarahnya. Bagi orang Bugis masa menyejarah inilah yang sangat penting. Maka Arung Palakka telah memulai keterlibatannya dalam menyejarah, melalui Perang Makassar dengan lewat pintu sejarah menurut filsafat sejarah Bugis, yakni menegakkan siri' (harga diri).

Kehadiran Arung Palakka adalah realitas sejarah sebagai awal bagi suatu babak baru dalam percaturan politik dan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Sejarah bukan hanya hikayat seseorang, melainkan riwayat masyarakat yang penuh dengan berbagai rona dalam dimensi-dimensi social, budaya, agama, politik,

filsafat, seni, adat istiadat, mistik, ritual dan sebagainya. Semua ini adalah pembentuk harga diri dari orang Bugis. Arung Palakka sebagai Raja Bone dan pemimpin persekutuan terbesar kerajaan di Sulawesi Selatan dan Timur Nusantara, telah mengantarkan masyarakat Sulawesi Selatan memasuki era baru dalam babakan sejarahnya.

Memperhatikan perjuangan rakyat Bone dibawah kepemimpinan Arung Palakka dalam menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang terinjak-injak ketika itu, akibat diperlakukan sebagai budak oleh Gowa dengan cara kerja paksa, adalah factor penyebab keterlibatannya untuk menyejarah. Hal itu dilakukan untuk mencari keseimbangan, dan merebut harga dirinya yang hilang. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya dari Raja Bone lainnya dalam menghadapi ekspansi Gowa.

Persoalannya sekarang ialah seberapa besar pengaruh perjuangan kemanusiaan yang dikobarkan Arung Palakka mampu melampaui batas-batas wilayah, daerah, dan kawasannya. Apakah tema perjuangan kemanusiaan Arung Palakka ketika itu mampu mengalahkan tema actual di abad ke XVII, sehingga tema perjuangan itu dapat diterima secara universal oleh zamannya? Dengan begitu, akan tampak jelas bahwa persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan peristiwanya atau kejadiannya, melainkan filsafat sejarahnya, yakni ide keterlibatan Arung Palakka dalam perang, bukan jalannya peperangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Farid, Zainal. 1969. Perkembangan Kekuasaan Datu Luwu sepanjang yang sampai pada kita melalui keterangan-keterangan orang Luwu, dalam *Bingkisan* III, No.1,2,dan 3. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Se-

- latan Tenggara.
- Amansyah, Andi Makkasau. 1969. Pengaruh Islam dalam Adat Istiadat Bugis-Makassar, dalam *Bingkisan II*, No.5. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Andaya, Leonard. 1975. *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century*. The Hague: Martinus Nijhof.
- Borahima, Ridwan. 1971. *Sejarah Bone pada Masa Pemerintahan Arung Palakka*. Malang: Fakultas Keguruan Ilmu Sosial.
- Daeng Patunru, Abdul Razak. 1969. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Daeng Tapala, Laside. 1968. Sekelumit Roman dan Penghidupan Arung Palakka Malempe'e Gemme'na, dalam *Bingkisan* No.3. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Daeng Tapala, Laside. 1969. Lontara Malempe'e Gemme'na: Sulawesi Riattang 1611-1796, dalam *Bingkisan* No.5. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Hamid, Abu. 1965. *Tinjauan Struktur atas Peranan Kehidupan dalam Masyarakat Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin, Faculty of Arst. Thesis Unpublished.
- Kasim, Sultan. 1970. *Latar Belakang Perjanjian Persahabatan Arung Palakka dan Kompeni Belanda/VOC tahun 1669*. Makassar: IKIP Ujung Pandang.
- Mattulada. 1974. *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Makkaraka, Andi. 1970. Tjeritera Orang dahulu yang Mula pertama yang ditulis pada daun-daunan, digulung dan kelak kemudian dikenal sebagai awal mula tulisan Bugis Lontara, dalam *Bingkisan* No.6. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- M.Sewang, Ahmad. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad ke-XVI sampai Abad ke-XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nur, Azhar. 2009. *Trialliance Tellumpocco'e*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Poelinggomang, Edward. L. 2004/2005. *Sejarah Sulawesi Selatan*, Jilid 1. Makassar: Balitbangda.
- Rasyid, Darwas. 1994. *Latenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan*, Cetakan I. Ujung Pandang: Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.
- Rasyid, Darwas. 1993. *Laporan Hasil Penelitian Sejarah Sulawesi Selatan (Biografi Arung Palakka)*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.
- Rahim, Abdul Rauf. 1974. *Hubungan Perjanjian Bongaya dengan Proses Kemunduran Kerajaan Gowa*. Ujung Pandang: Insititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial.
- Undang-Undang Bone. 1914, diterjemahkan oleh Daeng Latuppu dari sumber aslinya "in Colectie Korn Celebes 12, KITLV, Leiden.